

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi tradisional mengukur kesejahteraan (*welfare*) suatu negara dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Todaro dan Smith (2011:16) menjelaskan bahwa PDB merupakan nilai dari seluruh *output* akhir barang dan jasa dalam suatu negara. Konsumsi privat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih merupakan parameter perhitungan PDB. Cara hitung yang berfokus pada ukuran materi dan berbasis harga pasar (*market value*) menjadi kelemahan PDB. Menurut Fleurbaey (2009), PDB mengabaikan kualitas hubungan sosial dan lingkungan alam. Berg (2009) mengungkapkan bahwa kelemahan PDB terletak pada biaya eksternalitas dan aktivitas/transaksi informal (*underground economy*) yang tidak diperhitungkan.

Perhitungan PDB tidak dapat menggambarkan kesejahteraan di seluruh dunia. Negara Bhutan menjadi bukti nyata kelemahan dari perhitungan PDB. Bhutan menganggap perhitungan PDB tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan untuk negaranya (Ura dkk., 2012). Bhutan merupakan negara kecil, terpencil, dan terkurung daratan (*landlocked*) dengan sistem kerajaan autarki. Kondisi tersebut menyebabkan Bhutan tidak dapat meningkatkan nilai PDB dan bersaing dengan negara lain. Bhutan dikategorikan sebagai negara yang tidak sejahtera oleh perhitungan PDB. Nilai kebudayaan dan pelestarian alam yang menjadi keunggulan Negara Bhutan tidak dapat meningkatkan PDB, bahkan menjadi penghambat. Oleh

sebab itu, Bhutan memperkenalkan konsep *Gross National Happiness (GNH)* yang menggunakan kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan suatu negara. Menurut Uradkk. (2012), GNH tidak hanya mengukur kualitas sebuah negara dari aspek materi, tetapi juga melibatkan aspek non-materi.

Kebahagiaan adalah lambang dari kesejahteraan. Kebahagiaan juga merupakan ukuran kepuasan hidup yang dipersepsikan secara subjektif oleh setiap individu (Frey dan Stutzer, 2002). Oleh karena itu, istilah “kesejahteraan subjektif atau *subjective well-being*” sering digunakan untuk menggambarkan kebahagiaan atau kepuasan hidup. Berdasarkan literatur yang ada, kepuasan hidup pada umumnya dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan “seberapa puas kehidupan yang anda rasakan saat ini?”.

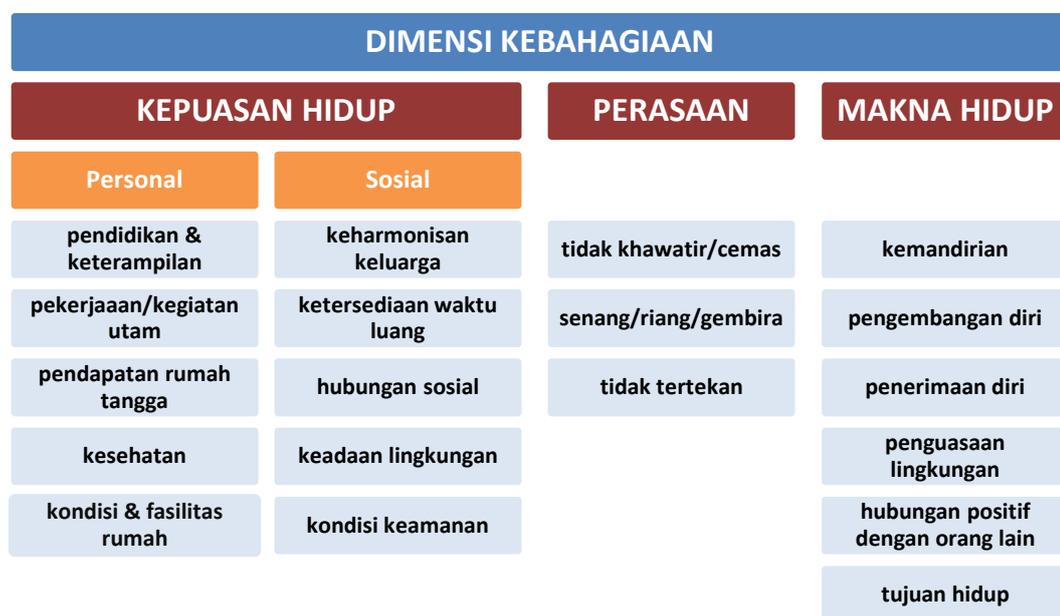
Sejak kebahagiaan dapat diukur dengan laporan subjektif, para ekonom meneliti hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Bukti akademis menunjukkan bahwa kebahagiaan pada kenyataannya tidak cukup kuat hubungannya dengan PDB. Easterlin (1974) mengkaji hubungan kesejahteraan subjektif dengan pendapatan di negara-negara maju dan berkembang. Peneliti menemukan bahwa dalam suatu negara kebahagiaan individu berasosiasi positif dengan pendapatan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh data antar negara. Kebahagiaan di negara-negara maju tidak berbeda jauh dengan kebahagiaan di negara-negara berkembang. Pendapatan rata-rata yang meningkat di Negara Amerika Serikat tahun 1946-1970 tidak diikuti oleh rata-rata peningkatan kebahagiaan individu (Easterlin, 1974). Hasil tersebut menunjukkan adanya paradoks antara kebahagiaan dan pendapatan. Paradoks tersebut selanjutnya dikenal oleh ekonom dengan istilah *Easterlin Paradox*.

Sebuah argumentasi tandingan meragukan kebenaran *Easterlin Paradox*. Hasil penelitian di negara-negara dalam *World Values Survey*, Eropa, dan Jepang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan kebahagiaan (Stevenson dan Wolfers, 2008). Penelitian tersebut menguatkan pandangan ekonomi tradisional akan pentingnya PDB sebagai indikator kesejahteraan. Adanya perbedaan pandangan atau konsep dalam studi kebahagiaan menjadi salah satu alasan mengapa konsep kebahagiaan sangat menarik untuk diteliti.

Ekonom akhirnya mengakui bahwa kesejahteraan dapat diukur lebih dari sekedar PDB atau *Beyond GDP* (Gilland dkk., 1990). Kesejahteraan tidak hanya diukur dari kemakmuran materi (*objective well-being*), tetapi juga mengarah pada kebahagiaan (kesejahteraan subjektif). Ukuran kebahagiaan pertama kali diwujudkan oleh Bhutan dalam Indeks GNH pada tahun 2008 (Ura dkk., 2012). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mendeklarasikan penggunaan indeks kebahagiaan (*Happiness Index*) pada tahun 2011. Setelah PBB menyarankan dunia untuk menggunakan indeks kebahagiaan, Indeks GNH kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menyusun indeks kebahagiaan di banyak negara, salah satunya Indonesia.

Indonesia mengikuti konsep kesejahteraan subjektif dengan melaksanakan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) pada tahun 2014 dan 2017. Studi tersebut dilakukan untuk mengetahui persepsi kepuasan responden terhadap setiap aspek penting pembentuk kebahagiaan (BPS, 2017:3). Survei ini menghasilkan ukuran kebahagiaan individu atau indeks kebahagiaan. Kebahagiaan dalam SPTK

2014 dibentuk oleh dimensi kepuasan hidup (*life satisfaction*). Berbeda dengan SPTK 2014, kebahagiaan dalam SPTK 2017 dibentuk oleh dimensi kepuasan hidup, perasaan (*afeksi*), dan makna hidup (*eudaimonia*). Setiap dimensi kebahagiaan dibentuk oleh indikator-indikator. Hubungan antara kebahagiaan, dimensi, dan indikator dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: BPS (2018a)

Gambar 1.1 Dimensi, Subdimensi dan Indikator Indeks Kebahagiaan SPTK 2017

Individu dalam mengukur tingkat kebahagiaan sering menggunakan pendekatan kepuasan hidup terhadap kehidupan nyata. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang rasional. Indikator-indikator dalam dimensi kepuasan hidup lebih rasional. Indikator tersebut dijadikan pertimbangan oleh individu dalam mengukur tingkat kebahagiaan. Oleh sebab itu, studi ini merupakan studi kebahagiaan yang diimplementasikan ke dalam salah satu indikator pembentuk dimensi kepuasan hidup.

Kepuasan atas kondisi dan fasilitas rumah yang ditempati merupakan indikator terpenting dalam dimensi kepuasan hidup. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Clapham (2010) yang menemukan bahwa determinan kepuasan rumah merupakan faktor penting dalam membentuk kepuasan hidup individu. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan pada kepuasan kualitas rumah. Kondisi rumah yang lebih baik juga memengaruhi kesehatan dan kepuasan hidup pemiliknya. Penelitian tentang program semenisasi di Meksiko membuktikan bahwa peningkatan kualitas lantai dari tanah menjadi semen menyebabkan peningkatan kesehatan dan kepuasan hidup (Cattaneo dkk., 2009).

Rumah merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi disamping kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan akan manfaat rumah yang terpenuhi memberikan pengalaman kepuasan yang lebih lama dibandingkan pemenuhan makanan dan pakaian. Menurut Sastra dan Marlina (2013), rumah melindungi penghuninya dari gangguan alam dan binatang. Rumah juga berfungsi sebagai tempat istirahat yang menjamin keberlangsungan hidup. Rumah melindungi kekayaan dan memberikan keselamatan atas apapun yang ada di dalam rumah tersebut.

Kebutuhan rumah yang harus dipenuhi merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia memandang kebutuhan dasar akan rumah tidak hanya pada penguasaan/kepemilikan bangunan tetapi juga pada kualitas bangunan yang layak huni. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi dasar bahwa kebutuhan rumah tidak cukup pada

penguasaan/kepemilikan bangunan, tetapi kualitas fisik bangunan juga harus dipenuhi. Kualitas fisik bangunan merupakan kualitas komponen utama seperti atap, dinding, dan lantai. Kualitas bangunan yang layak huni harus dapat menjamin keamanan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan penghuninya.

Rumah dengan kriteria tidak layak huni menjadi bagian dari komponen kemiskinan di Indonesia (BPS, 2018b). Oleh sebab itu, isu kemiskinan menjadi dasar dalam penetapan parameter Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan 11 pada TPB adalah membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan (BPS, 2018b). Salah satu parameter dalam TPB yang ke-11 adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

Badan Pusat Statistik atau BPS (2018) mempublikasikan bahwa persentase rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 4,93 persen. Pada tahun 2018, persentase RTLH menjadi 4,30 persen. Persentase RTLH turun namun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan database RTLH (BPSDM-PUPR, 2016). Database rumah yang terbatas menyebabkan pelaksanaan program pemerintah tidak tepat sasaran, anggaran, dan waktu.

Informasi mengenai determinan kepuasan rumah yang terbatas juga memengaruhi suksesnya pelaksanaan program pemerintah. Determinan kepuasan rumah sangat penting untuk melihat faktor mana yang berkontribusi dan berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup atau kebahagiaan masyarakat. Kualitas rumah layak huni diduga menjadi faktor utama dalam meningkatkan

kepuasan rumah yang ditempati. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mampu mengidentifikasi determinan kepuasan rumah. Hal ini bertujuan agar keputusan-keputusan yang diambil dapat mengarah kepada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa studi pernah meneliti hubungan kualitas rumah yang ditempati terhadap kepuasan rumah. Rudolf dan Potter (2015) menyimpulkan bahwa masyarakat Korea yang tinggal di kompleks apartemen memperoleh kepuasan yang paling besar. Addo (2016) menemukan bahwa karakteristik tempat tinggal memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan rumah di Accra, Ghana. Sementara itu, karakteristik apartemen di perkotaan Hanoi, Vietnam, berasosiasi positif terhadap kepuasan rumah (Nguyen dkk., 2017). Penelitian lain menyimpulkan bahwa kepuasan hidup keseluruhan dan kepuasan akan kualitas rumah masyarakat China di wilayah perkotaan secara signifikan dipengaruhi oleh status kepemilikan rumah (Zhang dkk., 2018). Semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa studi kepuasan perumahan bertujuan untuk memperoleh informasi determinan kepuasan masyarakat terkait kualitas rumah. Semua literatur studi determinasi kepuasan perumahan dilakukan di negara-negara berkembang.

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sangat membutuhkan informasi mengenai determinan kepuasan rumah. Hal itu terkait dengan kebutuhan pemerintah dalam mewujudkan tujuan ke-11 dari TPB. Permasalahan mengenai proporsi rumah layak huni harus segera diatasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, studi mengenai kepuasan kualitas rumah masih

jarang ditemui di Indonesia. Oleh karena alasan tersebut, studi ini mengkaji determinan kepuasan rumah di Indonesia.

Studi ini juga meneliti hubungan kepuasan rumah terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat dan gotong-royong di Indonesia. Pandangan umum yang terbentuk di masyarakat mengenai hubungan kekayaan dan partisipasi masyarakat adalah negatif. Kekayaan yang semakin bertambah akan menyebabkan partisipasi individu di masyarakat semakin menurun. Wujud dari kekayaan dapat terlihat dari kondisi rumah yang ditempati. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki kesimpulan bahwa tingkat partisipasi sosial individu yang tinggal di rumah mewah adalah rendah.

Sebuah penelitian menunjukkan bukti yang berbeda dengan pandangan yang berkembang di dalam masyarakat. Beard (2005) menemukan bahwa kelompok individu dengan aset harta Rp. 7.057.500 - Rp. 21.100.000 mempunyai peluang partisipasi sosial lebih besar dibandingkan kelompok individu dengan jumlah aset dibawahnya. Peneliti juga menemukan bahwa kelompok individu dengan aset harta diatas Rp. 56.225.000 mendonasikan harta yang paling banyak. Berkaitan dengan pandangan masyarakat dan bukti akademis tersebut, studi ini membawa kajian kepuasan akan rumah sebagaimana kajian mengenai kekayaan sebagai salah satu determinan dalam partisipasi masyarakat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa kebutuhan akan rumah yang terpenuhi dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membentuk permukiman yang berkualitas (Handayani, 2008). Studi tersebut menekankan partisipasi pada kegiatan bersama dalam memelihara dan mengelola lingkungan agar menjadi

permukiman yang tidak kumuh, layak, bersih, dan sehat. Peneliti membangun hubungan antara kepuasan rumah dan partisipasi masyarakat atas dasar tingkatan kebutuhan rumah (Sastra dan Marlina, 2013). Pemahaman yang baik mengenai kebutuhan akan rumah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara lingkungannya.

Partisipasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun modal sosial. Grootaert dan Bastelaer (2002) mengungkapkan bahwa salah satu kekuatan modal sosial yang memanfaatkan energi kolektif seperti budaya tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat adalah resiprositas dan aksi bersama. Aksi bersama dalam kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum maupun kelompok merupakan indikator utama modal sosial.

Seseorang secara rasional akan berusaha memaksimalkan terpenuhinya setiap kebutuhan hidupnya. Individu yang merasa puas terhadap kebutuhan rumah sebagai perlindungan dan keamanan akan berusaha memenuhi kebutuhan perumahan sebagai identitas diri. Tanda identitas diri seseorang diakui sebagai bagian dari masyarakat dilingkungannya adalah ketika individu tersebut mendapatkan manfaat dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, individu yang ingin mendapatkan manfaat dari lingkungannya akan menguatkan posisinya di lingkungan sekitar dengan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Keunggulan penelitian ini terletak pada studi mengenai kepuasan perumahan dan partisipasi individu dalam pembangunan yang masih jarang ditemui di Indonesia. Studi ini secara keseluruhan berbeda dengan literatur sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada gabungan dua penelitian sekaligus yaitu

determinan kepuasan rumah dan hubungan kepuasan rumah terhadap partisipasi rapat dan gotong-royong. Partisipasi masyarakat dalam bentuk rapat dan gotong-royong merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan mengenai masalah infrastruktur, sarana dan prasarana desa, potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah. Kinerja pembangunan dipengaruhi oleh suksesnya penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk rapat dan gotong-royong dapat menjadi parameter kinerja pembangunan. Studi ini juga menggunakan variabel baru yaitu rumah layak huni yang mengacu pada SDGs dan merupakan bagian dari karakteristik rumah sebagai indikator dari kepuasan rumah (Addo, 2016; Baiden, dkk., 2011; Galster, 1987; Diaz-Serrano, 2006). Variabel tersebut belum pernah digunakan dalam studi lain. Hasil studi menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia secara umum, bahkan dibagi berdasarkan pembagian wilayah menurut pulau. Keunggulan lainnya terletak pada data yang digunakan berupa data mikro terbaru hasil dari laporan kepuasan masyarakat Indonesia tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah untuk studi ini dinyatakan sebagai berikut.

1. Indikator apa saja yang menjadi determinan kepuasan subjektif individu terkait kualitas rumah yang ditempati di Indonesia pada tahun 2017 dan bagaimana pengaruh indikator tersebut terhadap kepuasan rumah?

2. Bagaimana pengaruh kepuasan akan rumah yang ditempati terhadap partisipasi individu dalam kegiatan rapat warga di Indonesia pada tahun 2017?
3. Bagaimana pengaruh kepuasan akan rumah yang ditempati terhadap partisipasi individu dalam kegiatan gotong royong di Indonesia pada tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis determinan kepuasan rumah di Indonesia pada tahun 2017 sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap sebagai landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan perumahan yang mengarah kepada perbaikan kualitas hidup masyarakat.
2. Menganalisis pengaruh kepuasan rumah terhadap partisipasi individu di masyarakat dalam kegiatan rapat di Indonesia pada tahun 2017.
3. Menganalisis pengaruh kepuasan rumah terhadap partisipasi individu di masyarakat dalam kegiatan gotong royong di Indonesia pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran umum masyarakat Indonesia pada tahun 2017 mengenai karakteristik individu, karakteristik rumah dan fasilitas yang dimiliki di dalam rumah, tingkat kepuasan subjektif individu terkait kualitas

rumah yang dimiliki, serta tingkat partisipasi individu dalam rapat dan gotong royong.

2. Menjadi kajian akademis mengenai aplikasi studi kesejahteraan subjektif dalam domain kepuasan hidup khususnya aspek perumahan.
3. Memberikan informasi dasar bagi pemerintah mengenai indikator determinan kepuasan rumah dan hubungan antara partisipasi individu dalam rapat dan gotong royong dengan kepuasan rumah. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan umum dalam perumusan kebijakan perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Informasi juga dapat menjadi dasar pentingnya kepuasan rumah dalam meningkatkan indeks kebahagiaan Indonesia.
4. Memberikan wawasan mengenai studi kebahagiaan bagi para pembaca, khususnya bagi orang-orang yang tertarik dan berminat pada bidang ekonomi sosial.

1.5 Lingkup Penelitian

Lingkup bahasan dalam penelitian ini mengenai kepuasan perumahan dan indikator pembentuknya serta pengaruhnya terhadap partisipasi individu dalam kegiatan rapat dan gotong-royong di Indonesia pada tahun 2017. Studi ini menggunakan data mikro dari sampel SPTK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Setiap rumah tangga diwakili oleh satu responden yaitu kepala rumah tangga (KRT) atau pasangan KRT.

Sebuah rumah tangga yang diwakili oleh satu responden merupakan metodologi pengambilan sampel yang digunakan oleh BPS dalam SPTK 2017. Cara

pengambilan sampel tersebut menjadi suatu keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan lainnya adalah data yang digunakan berupa data *cross section*. Data tersebut hanya menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia secara umum. Data tidak dapat diaplikasikan pada lingkup yang lebih kecil seperti kabupaten, desa, maupun kompleks perumahan.

1.6 Sitematika Tesis

Sistematika penulisan dalam tesis ini ditulis dalam lima bagian yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

BAB 1: PENDAHULUAN.

Bagian ini dibagi dalam enam subbagian. (1) latar belakang permasalahan penelitian, (2) rumusan masalah yang disimpulkan dari gambaran latar belakang, (3) tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, (4) manfaat dari penelitian, (5) ruang lingkup dan batasan penelitian, serta (6) sistematika penulisan tesis.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA.

Bagian ini berisi landasan teori dan konsep kebahagiaan beserta studi empiris hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian serta menggambarkan kerangka pikir dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN.

Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan rangkuman hasil pengolahan data, analisis deskriptif dan inferensia. Penjelasan mengenai kondisi kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia terkait perumahan akan dibahas pada awal bab Pembahasan selanjutnya mengenai indikator pembentuk kesejahteraan subjektif perumahan. Pengaruh kondisi dan fasilitas rumah terhadap partisipasi individu dalam kegiatan rapat dan gotong-royong akan dijelaskan pada akhir pembahasan.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi pokok hasil penelitian, saran terkait penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.